

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MALANG
NOMOR : 188.45/ /KEP/421.130/2014
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA
KERJA KECAMATAN NGAJUM
KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA
KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RKPD dan Renstra SKPD dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Renja Kecamatan Ngajum Tahun 2015 disusun .dengan menggunakan pendekatan perencanaan teknokratis (strategis berbasis kinerja), dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan, e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) Kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka berfikir yang komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui a) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non pemerintah, c) Keterwakilan yang mewadai dari seluruh segmen masyarakat terutama kaum perempuan dan kelompok marginal, d) Berperan aktif pada pelaksanaan musrenbang RKPD dari segi penerapan perencanaan partisipatif, e) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan serta prioritas program.

Pendekatan politis, penyusunan Renja SKPD mengacu pada RKPD dan RPJMD yang merupakan bentuk konsekwensi politis antara Bupati/wakil Bupati terpilih. Pendekatan ini juga tercermin pada keterlibatan aktif DPRD dalam musrenbang Kecamatan dan Kabupaten termasuk hasil sinergitas hasil jarring aspirasi masyarakat oleh DPRD, kemudian dokumen RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan sampai RAPBD .

Pendekatan Top Down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui rapat koordinasi dan musrenbang mulai tingkat Nasional, Provinsi dan

Kabupaten juga tujuan global MDGs. Pendekatan ini tercermin pada a) Sinergi dengan Program prioritas Nasional dan daerah, b) Konsisten pada RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD, Konsisten dengan dokumen RTRW Daerah, c) Penanganan masalah dengan pendekatan holistic dan pendekatan sistem.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi misi RPJMD serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum SKPD.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan hukum

Dalam menyusun Renja Kecamatan Ngajum tahun 2015 mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : a) Landasan idiil Pancasila, b) Landasan konstitusional UUD'45, serta c) Landasan operasional :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Daerah Kecamatan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015
17. Peraturan Bupati Malang No. 11/2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. menjabarkan arahan Renstra Kecamatan Ngajum Tahun 2011-2015.

2. Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

b. Tujuan

1. Memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan pembangunan.
2. Menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Ngajum Tahun 2015.
3. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Renja SKPD disajikan dalam 4 bab sebagaimana tersebut dibawah ini.

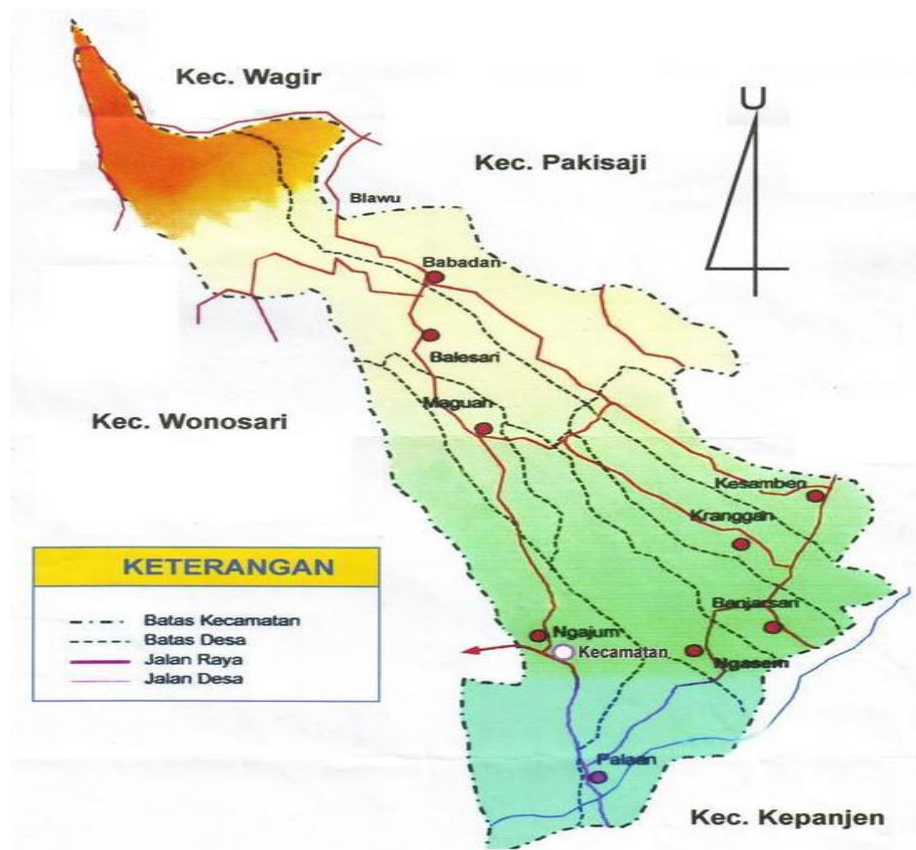
- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penyusunan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngajum Tahun 2014
 - 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngajum Tahun 2014 dan capaian Renstra Kecamatan Ngajum
 - 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
 - 2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2015
 - 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - 3.1 Telaah terhadap kebijakan Daerah
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- Bab IV Program dan Kegiatan
- Bab V Penutup.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN NGAJUM TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngajum Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Ngajum.

a. Gambaran Umum Wilayah

Luas Wilayah 6.006,70 H, topografi wilayah Ngajum batas sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wagir, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen dan Kromengan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen dan Pakisaji, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosari dan Kromengan, Jumlah desa 9 Jumlah RT. 329, RW. 92 Jumlah Penduduk 51.806 jiwa, Potensi Gender, adanya Koperasi Wanita di masing – masing desa, mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai buruh tani, dagang, buruh pabrik dan buruh bangunan, Agama yang dianut Islam, Kristen, Hindu, Ormas/Orpol yang ada Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra. Nasdem, PKB, PAN, Hanura, PBB, PKPI.



Potensi ekonomi wilayah dicerminkan dengan komoditas dan produk unggulan Desa dan Kecamatan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.1.1
Produk Unggulan Kecamatan Ngajum

No	Nama Komoditas/ Unggulan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Jumlah Produksi (... Ton/Ha /Tahun)	Jumlah/ Luas Lahan (Ha)
1	Pertanian/Perkebunan?Peternakan/Perikanan			
	-Tebu	Ngajum,Palaan. Ngasem, Banjarsari Kranggan,Kesamben, Babadan, Balesari, Maguan	121.138,15	1.730,545
	-Kopi	9 (Sembilan) desa	559,9	505,75
	-Cengkeh	9 (Sembilan) desa	330,75	94,5
	-Padi	9 (Sembilan) desa	21.557,634	3.592,939
	-Jagung	9 (Sembilan) desa	3.975,629	924,565
	-Ubi Jalar	Babadan & Balesari	2.116,8	116,40
	-Pembibitan ternak Lele	Maguan	123.840	2,58
2	Industri pengolahan - Tape Singkong, Bipang dan Tahu - Jahe Instan - Minyak daun cengkeh -Kripik Talas	Banjarsari Ngasem Balesari Maguan		
3	Kerajinan - Kropak dari Bambu -Biting Duporatus -Emas dan Perak	Ngajum Babadan, Balesari, Ngajum Maguan		

Sarana Prasarana wilayah yang dimiliki Kecamatan Ngajum meliputi :

- Pendidikan,TK. = 46, SD = 37, SMP = 11, SMU = 3.
- Sarana Kesehatan, Puskesmas = 1, Polindes = 9.Postu : 2
- Sarana Keagamaan, Masjid.51, Langgar= 250, Gereja= 2, Pure = 8,
- Sarana Wisata, Ritual Kraton Gunung Kawi.
- Sarana Olah Raga.Lapangan Sepak Bola = 11, Bola Volly = 12, Bulu Tangkis = 8..

- o Prasarana jalan/jembatan (panjang jalan: 8.272 km, jumlah jembatan : 46 buah), Air Bersih dan sanitasi : 93 %, PJU : 15 titik --- Kondisi baik. Pelayanan Masyarakat meliputi Perijinan./KTP/KK/SKCK/Pindah Tempat, Kartu Kuning, Legalisasi.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sebanyak 16 orang, adapun dari kepangkatan dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.2

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina Tk.I	1	III/a	1
S1	6	Pembina	1	III/b	1
SMA	7	Penata TK.I	3	IV/a	5
SMP	2	Penata	5	IV/b	3
		Penata Muda Tk I	1		
		Pengatur	1		
		Pengatur Muda Tk I	1		
		Pengatur Muda	1		
		Sukwan	2		
Jumlah	16		14		10
Kelompok Jabatan Fungsional yang ada					
- 3 (tiga) PLKB					

Tabel 2.1.3

Jenis Diklat Penunjang

No	Uraian	Jumlah
Diklat Kepemimpinan		
	PIM II	-
	PIM III	2
	PIM IV	7
	Jumlah	9
Diklat Teknis Fungsional		12

c. Sarana Dan Prasarana pendukung Kecamatan

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Kecamatan Ngajum memiliki sarana / prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut:

Tabel 2.1.4

Kantor dan Perlengkapan Kantor

No	Jenis fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Rumah Dinas	1	Baik
3	Ruang Rapat	1	Baik
4	Panti PKK	1	Baik
5	Ruang Computer	1	Baik
6	Meja Kerja	16	Baik
7	Kursi kerja	16	Baik
8	Papan data	3	Baik
9	Papan informasi	1	Baik
10	Fasilitas Umum (Musholla/MCK)	-	-
11	Komputer	5	Baik
12	Mesin Ketik	2	Rusak
13	Filling Cabinet	3	Baik
14	Rak odner	-	-

d. Anggaran dan Realisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Ngajum diberikan alokasi anggaran sebagaimana Renstra Kecamatan Ngajum sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.5

Anggaran dan Realisasi Anggaran 2012-2014

	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014
Anggaran	154.069.000	250.000.000	250.000.000
Realisasi	154.069.000	148.729.000	104.165.000
Rasio Capaian	100%	100%	41%
	2014	2015	
Proyeksi	250.000.000	250.000.000	250.000.000

e. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan capaian Renstra Kecamatan Ngajum

Evaluasi Anggaran Kecamatan Ngajum tahun 2014 secara rinci dapat disampaikan melalui urusan bidang urusan program kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target capaian program Renstra tahun 2015, realisasi target kinerja hasil program dan keluaran s/d tahun 2012, target dan realisasi Renja tahun 2013, target program / kegiatan tahun 2014 dan perkiraan realisasi capaian Renstra s/d tahun 2015 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.6

**Rekap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian RenstraSKPD s/d Tahun 2014
Kecamatan Ngajum**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun.2015)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d th 2012	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target Program/Kegiatan Tahun 2014	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d th 2015				
					Target Renja Tahun 2013	Realisasi Renja Tahun 2013	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d th. 2015	Tk. Capaian realisasi target renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Urusan :Otoda												
1	Bid. Urusan Penyelenggaraan Pemerintah												
1	0 1	0 1	1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi masyarakat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60	
1	0 1	0 1	0 1	<ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik o Penyediaan jasa administrasi keuangan o Penyediaan jasa kebersihan kantor o Penyediaan alat tulis kantor o Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 	<ul style="list-style-type: none"> o Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik o Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan o Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor o Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor o Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan o Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman o Terlaksananya 	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60

				<ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan makanan dan minuman o Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60 Bulan								
1	0 1	0 1	0 2	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60
1	0 1	0 1	0 3	<ul style="list-style-type: none"> o Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. o Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 	<ul style="list-style-type: none"> o Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. o Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60
				3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumberdaya aparatur	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60
				o Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD	o Terlaksananya Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngajum

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	Th. 2012	Th. 2013	Th. 2014	Th. 2015	
	Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang		<ul style="list-style-type: none"> o Terpenuhi nya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik o Terpenuhi nya Penyediaan jasa administrasi keuangan o Terpenuhi nya Penyediaan jasa kebersihan kantor o Terpenuhi nya Penyediaan alat tulis kantor o Terpenuhi nya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan o Terpenuhi nya Penyediaan makanan dan minuman o Terpenuhi nya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	103 Delegasi	106 Delegasi	125 Delegasi	150 Delegasi	103 Delegasi	106 Delegasi	103 Delegasi	150 Delegasi	Sampai bulan Desember 2014 realisasi anggaran masih sebesar 82,4 %
	Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan		<ul style="list-style-type: none"> o Terpenuhi nya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. o Terpenuhi nya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 	3 KTP Reguler perhari	5 KTP Reguler perhari	8 KTP Reguler perhari	4 KTP Reguler perhari	Rata – Rata 3 KTP Perhari	Rata – Rata 5 KTP Perhari	Rata – Rata 5 KTP Perhari	Rata – Rata 4 Pengantar KTP dan KK Perhari	Sampai dengan akhir Desember 2014 tercapai 62,5 %

	Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling Aktif di Desa		o Terlaksananya Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD	91 Poskamling	92 Poskamling	92 Poskamling	96 Poskamling	91 Poskamling	92 Poskamling	92 Poskamling	96 Poskamling	Sampai dengan Akhir Desember 2014 tercapai 100%
	Total			60 Bulan	60 Bulan	60 Bulan	60 Bulan	60 Bulan	60 Bulan	60 Bulan	60 Bulan	Sesuai Renstra Kecamatan Ngajum Tahun 2011-2015

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

1. Permasalahan

Permasalahan Kecamatan Ngajum dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

- Kualitas SDM yang belum memadai;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan.
- Belum tertibnya sistim administrasi perkantoran

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Ngajum secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan :

2) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

- Masih banyak Penduduk wajib KTP dan KK yang belum terdata dengan baik.
- Bahwa masih banyak warga yang masa berlakunya KTP habis
- Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai Akta Lahir di karenakan sulitnya proses pengurusan akte kelahiran.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 90% warga Desa sudah mempunyai KTP dan KK sebagai identitas formal.

3) Peraturan Desa , permasalahan :

Dalam pembuatan Peraturan Desa di Tahun 2014 masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkawalitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

4) Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan :

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggung jawaban ADD untuk seluruh Desa masih terjadi adanya kekurangan.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Tata Pemerintahan Desa, namun secara umum pelaksanaan ADD di kecamatan Ngajum tidak ada permasalahan.

5) Pembinaan Perangkat, Permasalahan :

- Masih perlu peningkatan Sumberdaya Manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien
- Sistim administrasi Produk hukum, kependudukan dan urusan pemerintahan masih perlu adanya pembinaan.

Upaya yang telah dilakukan :

- Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa
- Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana admnistrasi
- Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi Hukum.

1) Bidang Pertanahan Dan Aset, Permasalahan:

- Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan STTS sangat pendek.
- Adanya SPPT yang salah nama

- Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar Kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan

- Sebelum SPPT dibagikan dilaksanakan rapat persiapan Penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa, koordinator PBB Desa dan Petugas Rayon Desa Sewilayah Kecamatan Ngajum. Serta pembentukan Petugas Khusus Kecamatan dan Petugas Bina Desa dari Staf Kecamatan. Dengan terbentuknya Petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas Khusus kecamatan bertugas mengkoordinir Petugas Rayonisasi dan Petugas Khusus Desa dalam hal penerimaan Pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 1 minggu sekali mengadakan Evaluasi penerimaan PBB. Petugas Khusus Desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas Pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu Petugas Pemungut menangani Wajib Pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).
- Untuk memaksimalkan penerimaan PBB kami mengadakan Publikasi arti pentingnya membayar PBB ke Desa-desa setelah SPPT disampaikan ke wajib pajak sebelum jatuh tempo pelunasannya.
- Dengan demikian permasalahan yang ada dapat diatasi serta penerimaan PBB dapat dimaksimalkan serta selesai pelunasannya sebelum jatuh tempo.

Tabel. 2.3.5.
Realisasi dan Target dan proyeksi PBB tahun 2012 sampai dengan 2014

No	Desa	Realisasi		Target Tahun 2014	Proyeksi Tahun 2015
		Tahun 2012	Tahun 2013		
1	Ngajum	171,202,741	171,092,708	159,222,498	159,222,498
2	Pala'an	57,808,291	57,812,341	54,601,881	54,601,881
3	Ngasem	110,139,108	110,957,849	104,149,141	104,149,141
4	Banjarsari	81,534,201	73,304,201	70,447,702	70,447,702
5	Kranggan	73,545,934	73,777,711	68,304,929	68,304,929
6	Kesamben	78,225,002	76,633,343	71,902,582	71,902,582
7	Babadan	139,210,141	144,506,268	137,313,366	137,313,366
8	Balesari	139,491,628	140,238,825	134,453,406	134,453,406
9	Maguan	46,482,896	46,858,667	44,784,957	44,784,957
	Jumlah	897,639,947	895,181,913	845,180,462	845,180,462

b. **Bidang Ekonomi Pembangunan Dan Pemberdayaan Perempuan** , permasalahan,

- Bidang Ekonomi Pembangunan :
 - Produksi hasil pertanian kurang maksimal disebabkan harga pupuk mahal dan sulit untuk memperolehnya.
 - Pembangunan yang dilaksanakan oleh rekanan anggaran APBD II masih banyak yang belum di laporkan ke Kecamatan dan tanpa ada pemasangan papan nama sehingga volume anggaran tidak jelas menyulitkan pendataan bagi Kecamatan.
 - Sarana transportasi jalan banyak yang rusak.
- Pemberdayaan Perempuan :
 - Banyaknya produksi unggulan dan usaha kecil (home industri) yang dikelola ibu – ibu yang tidak bisa berkembang disebabkan kurangnya modal.
 - Tidak adanya pembinaan / pelatihan bagi industri kecil.

Upaya yang telah dilakukan

- Bidang Ekonomi Pembangunan :
 - Telah diupayakan meningkatkan hasil produksi pertanian melalui pembinaan pada kelompok tani.
 - Melakukan pemantauan dan pendekatan langsung kepada rekanan untuk selalu mengadakan koordinasi setiap ada pembangunan di wilayah Kecamatan.

- Pemberdayaan Perempuan :
 - mengusulkan untuk diberikan tambahan pinjaman modal lunak dari Pemerintah serta diadakan pelatihan.
 - Diusulkan agar diadakan pembinaan bagi industri kecil (Home Industri)

c. **Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Kepemudaan , permasalahan :**

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan.
- Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah)
- Kepemudaan dan OR masih kurang pembinaan.

Upaya yang telah dilakukan

- Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB
- Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat Ngajum, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat.
- Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek
- Kepemudaan dan OR mengusulkan untuk diadakan pelatihan ketrampilan bagi pemuda melalui organisasi karang taruna.

d. **Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat**, Permasalahan :

- Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama
- Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan
- Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba
- Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha

Rekomendasi

- Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain
- Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana
- Mengadakan Sosialisasi secara berkala
- Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha

2. Peluang

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik
- Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan
- Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

3. Tantangan

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Belum optimalnya koordinasi dengan Dinas Teknis terkait
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2015

No	Rancangan Awal RKPD per tahun					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
I	1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Kantor Camat Ngajum	Meningkatnya Pelayanan administrasi masyarakat	12 Bulan	167.755.200	1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Kantor Camat Ngajum	Meningkatnya Pelayanan administrasi masyarakat	12 Bulan	167.755.200	
	<ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik o Penyediaan jasa administrasi keuangan o Penyediaan jasa kebersihan kantor o Penyediaan alat tulis kantor o Penyediaan barang cetakan dan penggandaan o Penyediaan makanan dan minuman o Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	Kantor Camat Ngajum	<ul style="list-style-type: none"> o Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik o Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan o Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor o Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor o Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan o Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman o Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	14.100.000,- 27.000.000,- 8.738.500,- 23.329.800,- 15.336.900,- 39.200.000,- 39.750.000,-	<ul style="list-style-type: none"> o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik o Penyediaan jasa administrasi keuangan o Penyediaan jasa kebersihan kantor o Penyediaan alat tulis kantor o Penyediaan barang cetakan dan penggandaan o Penyediaan makanan dan minuman o Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	Kantor Camat Ngajum	<ul style="list-style-type: none"> o Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik o Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan o Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor o Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor o Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan o Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman o Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	14.100.000,- 27.000.000,- 8.738.500,- 23.329.800,- 15.336.900,- 39.200.000,- 39.750.000,-	

II	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Kantor Camat Ngajum	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	12 Bulan	71.844.800,-	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Kantor Camat Ngajum	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	12 Bulan	71.844.800,-	
	<ul style="list-style-type: none"> o Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. o Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 	Kantor Camat Ngajum	<ul style="list-style-type: none"> o Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. o Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 	12 Bulan	37.844.800,-	<ul style="list-style-type: none"> o Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. o Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 	Kantor Camat Ngajum	<ul style="list-style-type: none"> o Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. o Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 	12 Bulan	37.844.800,-	
				12 Bulan	34.000.000,-				12 Bulan	34.000.000,-	
III	3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur	Kantor Camat Ngajum	Meningkatnya kapasitas Sumberdaya aparatur	12 Bulan	10.400.000,-	3. Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur	Kantor Camat Ngajum	Meningkatnya kapasitas Sumberdaya aparatur	12 Bulan	10.400.000	
	<ul style="list-style-type: none"> o Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD 	Kantor Camat Ngajum	<ul style="list-style-type: none"> o Terlaksananya Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD 	12 Bulan	10.400.000,-	<ul style="list-style-type: none"> o Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD 	Kantor Camat Ngajum	<ul style="list-style-type: none"> o Terlaksananya Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD 	12 Bulan	10.400.000,-	
	Total	Kantor Camat Ngajum		12 Bulan	250.000.000,-		Kantor Camat Ngajum		12 Bulan	250.000.000,-	Sesuai Renstra Kecamatan Ngajum Tahun 2011-2015 untuk tahun keempat

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan :

1. **Mandiri**, yang dimaknai dengan *pertama* : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. *Kedua*: Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa *leadership* dikalangan pemerintahan dan semangat *entrepreneurship* di kalangan masyarakat luas.
2. **Agamis**, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. **Demokratis**, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. **Produktif**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
5. **Maju**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
6. **Aman**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
7. **Tertib**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. **Berdaya Saing**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Dalam rangka mendukung visi tersebut Kecamatan Ngajum dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan akan mengoptimalkan peran serta masyarakat Kecamatan Ngajum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat Kecamatan Ngajum

b. Sasaran

- Meningkatkan pola koordinasi/fasilitasi dan motivasi di segala bidang pembangunan.
- Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM Aparatur.
- Mengotimalkan ketersediaan sarana prasarana.

BAB IV

Program Dan Kegiatan

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan perkiraan maju Tahun 2016
Kecamatan Ngajum**

Kode							Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	20	1	20	09	1		Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi masyarakat	Kantor Camat Ngajum	12 Bulan	167.755.200	PAD		12 Bulan	167.755.200
1	20	1	20	09	01	02	o Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	o Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kantor Camat Ngajum	12 Bulan	14.100.000,-	PAD		12 Bulan	14.100.000,-
1	20	1	20	09	01	07	o Penyediaan jasa administrasi keuangan	o Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bulan	27.000.000,-			12 Bulan	27.000.000,-
1	20	1	20	09	01	08	o Penyediaan jasa kebersihan kantor	o Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	8.738.500,-			12 Bulan	8.738.500,-
1	20	1	20	09	01	10	o Penyediaan alat tulis kantor	o Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan	23.329.800,-			12 Bulan	23.329.800,-
1	20	1	20	09	01	11	o Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	o Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	15.336.900,-			12 Bulan	15.336.900,-
1	20	1	20	09	01	17	o Penyediaan makanan dan minuman	o Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	39.200.000,-			12 Bulan	39.200.000,-
1	20	1	20	09	01	18	o Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	o Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan		12 Bulan	39.750.000,-			12 Bulan	39.750.000,-

								daerah	konsultasi ke luar daerah							
1	20	1	20	09	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Kantor Camat Ngajum	12 Bulan	71.844.800,-	PAD		12 Bulan	71.844.800,-
1	20	1	20	09	02	24		o Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	o Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	Kantor Camat Ngajum	12 Bulan	37.844.800,-	PAD		12 Bulan	37.844.800,-
1	20	1	20	09	02	28		o Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	o Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor Camat Ngajum	12 Bulan	34.000.000,-			12 Bulan	34.000.000,-
1	20	1	20	09	05			Program peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumberdaya aparatur	Kantor Camat Ngajum	12 Bulan	10.400.000,-	PAD		12 Bulan	10.400.000,-
1	20	1	20	09	05	01		o Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD	o Terlaksananya Memberikan fasilitas tugas-tugas pelatihan, Bintek, seminar kepada Aparatur kecamatan yang diselenggarakan SKPD	Kantor Camat Ngajum	12 Bulan	10.400.000,-	PAD		12 Bulan	10.400.000,-
								Total		Kantor Camat Ngajum	12 Bulan	250.000.000,-	PAD	Sesuai target Renstra Kec Ngajum	12 Bulan	250.000.000,-

BAB V (PENUTUP)

Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2015 ini merupakan penjabaran keempat dari Renstra Kecamatan Ngajum tahun 2011-2015

Rencana Kerja Kecamatan Ngajum Tahun 2015 akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2015, khususnya dalam menyusun RKA 2015.

Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Ngajum Tahun 2015 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan ini akan diadakan evaluasi dan dipertanggung jawabkan melalui LKPJ kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

CAMAT NGAJUM

LAMBOK SIHOMBING,SH
Pembina Tk.
NIP. 19610901 199503 1 001

